

## Abstrak

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Formil dan Syarat Materil dari UU No 37 Tahun 2004 Terhadap Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Medan)**

Oleh

**Dinda Agita Sari**

**Npm. 12.840.0216**

**Bidang Hukum Keperdataan**

Skripsi ini pada dasarnya adalah tentang seperti apa sebenarnya syarat formil dan syarat materil dari UU No.37 Tahun 2004 tentang perkara kepailitan dan mengkaitnya terhadap kasus pailitnya PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel.

Pembahasan yang diajukan adalah pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, dengan restrukturisasi utang dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan pailit, serta akibat hukum atas putusan pailit PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan Pemerintah, antara lain: peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan serta traktat, yang kedua bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, antara lain: buku, artikel, laporan penelitian, serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya dan ketiga bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, antara lain: internet dan lainnya serta melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Niaga Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan adanya syarat formil dan syarat materil yang mempengaruhi putusannya perkara kepailitan yang diajukan di Pengadilan Negeri Medan. Pernyataan pailit dapat dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang-utangnya.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.

Penelitian ini juga menyarankan pemerintah Indonesia harus menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Dan dari sudut pendidikan hukum, fakultas hukum perlu mengembangkan mata kuliah hukum kepailitan. Sehingga para sarjana hukum yang dihasilkan nantinya memahami peraturan pelaksanaan hukum kepailitan.

***Kata Kunci : Syarat formil dan syarat materil, kepailitan.***

**Abstract**  
**Overview Juridical Against Formal Terms and Conditions Petition of Law**  
**No.37 Year 2004 Toward Bankruptcy Case (Case Study Decision**  
**No.09/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Medan)**

By  
**Dinda Agita Sari**  
**Npm.12.840.0216**  
**Field of Civil Law**

This thesis is basically about what the actual formal requirements and material requirements of Law No.37 Year 2004 on bankruptcy cases and bankruptcy cases against PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel.

The discussion proposed is setting the bankruptcy law in Indonesia, with debt restructuring and suspension of debt payments by the bankrupt, as well as the legal consequences of bankruptcy ruling PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. To discuss these issues do research in the primary legal materials, it materials whose content is binding because it was issued the Government, among others: legislation, court decisions and treaties, which both secondary legal materials, it materials whose contents discusses the primary material, between other: books, articles, research reports, as well as a variety of other scientific papers and three tertiary legal materials, ie materials that are supporting primary and secondary materials, among others: the internet and more and doing field research in the Commercial Court of Medan.

The results of research and discussion explains the formal requirements and conditions that materially affect putusnya bankruptcy cases filed in the District Court of Medan. The declaration of bankruptcy may be filed by one or more creditors, or the public prosecutor in the public interest. Bankruptcy does not relieve a person who is declared bankrupt from paying its debts.

Verdict declaration of bankruptcy to change the legal status of a person becomes incapacitated to perform legal acts, control, and manage the wealth from the decision pronounced bankrupt.

The study also suggests the Indonesian government should ensure certainty, order, enforcement, and legal protection based on justice and truth that is expected to support the growth and development of the national economy, as well as securing and supporting the national development. And from a legal education, law schools need to develop a course of bankruptcy law. So that the legal scholars yang produced will understand the rules of bankruptcy law enforcement.

***Keywords: Terms formal and material requirements, bankruptcy.***